

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Wilayah Jawa Tengah

Secara astronomis, Jawa Tengah terletak antara $5^{\circ}40'$ dan $8^{\circ}30'$ lintang selatan dan antara $108^{\circ}30'$ dan $111^{\circ}30'$ bujur timur termasuk Pulau Karimunjawa. Berdasarkan posisi geografisnya, Jawa Tengah memiliki batas-batas:

- a. Utara – Laut Jawa
- b. Selatan – Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Samudra Hindia
- c. Barat – Provinsi Jawa Barat
- d. Timur– Provinsi Jawa Timur.¹

Jawa Tengah terdiri dari 35 Kabupaten/Kota yaitu 29 Kabupaten dan 6 Kota. Jawa Tengah sebagai salah satu Provinsi di Jawa, letaknya diapit oleh dua provinsi besar, yaitu Jawa Barat dan Jawa Timur. Letaknya antara $5^{\circ}40'$ dan $8^{\circ}30'$ Lintang Selatan dan antara $108^{\circ}30'$ dan $111^{\circ}30'$ bujur timur termasuk Pulau Karimunjawa. Jarak terjauh dari barat ke timur adalah 263 km dan dari utara ke S\selatan 226 km tidak termasuk Pulau Karimunjawa. Provinsi Jawa Tengah terbagi menjadi 29 kabupaten dan 6 kota. Luas wilayah Jawa Tengah tercatat sebesar 3,25 juta hektar atau sekitar 25,04 persen dari luas Pulau Jawa (1,70 persen dari luas Indonesia).²

Menurut Stasiun Klimatologi Klas I Semarang, suhu udara rata-rata di Jawa Tengah tahun 2016 berkisar antara $24,8^{\circ}\text{C}$ sampai dengan $28,3^{\circ}\text{C}$. Tempat – tempat yang letaknya berdekatan dengan pantai mempunyai suhu udara rata-rata relatif tinggi. Untuk kelembaban udara rata-rata bervariasi, dari 78% sampai dengan 87%. Curah hujan tertinggi tercatat di stasiun

¹ Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, *Provinsi Jawa Tengah dalam Angka 2017 Tahun 2010*, BPS Provinsi Jawa Tengah, Semarang, t.th., hlm. 3

² *Ibid.*, hlm. 4

meteorologi Purwokerto yaitu sebesar 12.170 mm dan hari hujan terbanyak tercatat di stasiun Banjarnegara sebanyak 276 hari.³

2. Kependudukan dan Ketenagakerjaan Jawa Tengah

Penduduk Provinsi Jawa Tengah berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2016 sebanyak 34.019,10 ribu jiwa yang terdiri atas 16.871,19 ribu jiwa penduduk laki-laki dan 17.147,90 ribu jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2015, penduduk Jawa Tengah mengalami pertumbuhan sebesar 0,73 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2016 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 98,39. Kepadatan penduduk di Jawa Tengah tahun 2016 mencapai 1.045 jiwa/km². Kepadatan Penduduk di 35 kabupaten/kota cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di kota Surakarta dengan kepadatan sebesar 11.678 jiwa/km² dan terendah di Kabupaten Blora sebesar 477 jiwa/Km².⁴

Berdasarkan hasil Sakernas, angkatan kerja di Jawa Tengah tahun 2016 mencapai 17,31 juta. Tingkat partisipasi angkatan kerja penduduk Jawa Tengah tercatat sebesar 67,15 persen. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka di Jawa Tengah sebesar 4,63 persen. Jumlah penduduk yang bekerja pada agustus 2016 sebesar 16,51 juta orang. Sektor 1 (pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan) masih merupakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja, dengan menyerap 5,07 juta orang (30,69 persen) pekerja, sementara sektor listrik, gas, dan air paling sedikit menyerap tenaga kerja, yaitu hanya menyerap 0,04 juta orang (0,23%) pekerja. Proporsi terbesar pekerja pada Agustus 2016 masih didominasi oleh buruh/karyawan/pegawai sebesar 34,80% atau 5,75 juta orang. Sementara proporsi terkecil pekerja adalah pekerja berusaha dibantu buruh tetap/ buruh dibayar hanya sebesar 3,03% atau 0,50 juta orang.⁵

³ *Ibid.*, hlm 5

⁴ *Ibid.*, hlm. 46

⁵ *Ibid.*, hlm. 47

B. Deskripsi Variabel

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Indeks Pembangunan Manusia (Y), sedangkan variabel independennya adalah UMR (X_1), Pengangguran (X_2) dan PDRB (X_3).

Statistik deskriptif yang akan dibahas meliputi : jumlah data (N), rata-rata sampel (mean), nilai maksimum, nilai minimum, serta standar deviasi (δ) untuk masing-masing variabel seperti terlihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1
Analisis Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
UMR	110	718.67	1535.00	973.5433	177.14637
PENGANGGURAN	110	1.50	11.98	5.5831	1.64857
PDRB	110	11.47	78.24	21.3327	13.97264
IPM	110	62.59	74.53	68.2406	2.93918
Valid N (listwise)	110				

Sumber : Data SPSS diolah (2018)

Pada tabel 4.1 diatas menunjukkan bahwa jumlah data yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 110 data yang diperoleh dari data publikasi Badan Pusat Statistik Jawa Tengah tahun 2011-2015.⁶

1. Upah Minimum Regional (X_1)

Berdasarkan peraturan Menteri Tenaga Kerja tentang Upah Minimum pasal 1, upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. Upah minimum ditetapkan berdasarkan standar layak hidup dengan memperhatikan produktivitas pertumbuhan ekonomi.⁷ Berikut ini daftar upah minimum regional di Jawa Tengah yang digunakan sebagai sampel penelitian :

⁶ Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19*, Badan Penerbit Undip, Semarang, 2011, hlm 21

⁷ Joni Bambang, *Hukum Ketenagakerjaan*, Pustaka Setia, Bandung, 2013, hlm. 172-173

Tabel 4.2
Upah Minimum Regional Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2015

No	Kabupaten	Upah Minimum Regional (UMR)				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Cilacap	718 666.67	773 000.00	986 000.00	1 125 000.00	1 287 000.00
2.	Banyumas	750 000.00	795 000.00	877 500.00	1 000 000.00	1 100 000.00
3.	Purbalingga	765 000.00	818 500.00	896 500.00	1 023 000.00	1 101 600.00
4.	Purworejo	755 000.00	809 000.00	849 000.00	910 000.00	1 165 000.00
5.	Wonosobo	775 000.00	825 000.00	880 000.00	990 000.00	1 166 000.00
6.	Magelang	802 500.00	870 000.00	942 000.00	1 152 000.00	1 255 000.00
7.	Boyolali	800 500.00	836 000.00	895 000.00	1 116 000.00	1 197 800.00
8.	Klaten	766 022.00	812 000.00	871 500.00	1 026 600.00	1 170 000.00
9.	Sukoharjo	790 500.00	843 000.00	902 000.00	1 150 000.00	1 223 000.00
10.	Karanganyar	801 500.00	846 000.00	896 500.00	1 060 000.00	1 226 000.00
11.	Sragen	760 000.00	810 000.00	864 000.00	960 000.00	1 105 000.00
12.	Blora	816 200.00	855 500.00	932 000.00	1 009 000.00	1 180 000.00
13.	Rembang	757 600.00	816 000.00	896 000.00	985 000.00	1 120 000.00
14.	Pati	769 550.00	837 500.00	927 600.00	1 013 027.00	1 176 500.00
15.	Kudus	840 000.00	889 000.00	990 000.00	1 150 000.00	1 380 000.00
16.	Jepara	758 000.00	800 000.00	875 000.00	1 000 000.00	1 150 000.00
17.	Demak	847 987.00	893 000.00	995 000.00	1 280 000.00	1 535 000.00
18.	Semarang	880 000.00	941 600.00	1 051 000.00	1 208 200.00	1 419 000.00
19.	Temanggung	779 000.00	866 000.00	940 000.00	1 050 000.00	1 178 000.00
20.	Kendal	843 750.00	893 000.00	953 100.00	1 206 000.00	1 383 450.00
21.	Batang	805 000.00	880 000.00	970 000.00	1 146 000.00	1 270 000.00
22.	Pekalongan	810 000.00	873 000.00	962 000.00	1 145 000.00	1 271 000.00

Sumber : Data Publikasi BPS Jawa Tengah, tahun 2018 (diolah).

Hasil SPSS pada tabel 4.1 menunjukkan bahwa data yang menjadi sampel penelitian adalah sebanyak 110 data. Selama tahun 2011-2015 Kabupaten Cilacap yang memiliki upah minimum regional paling kecil pada tahun 2011 yaitu sebesar Rp. 718.666. Sedangkan yang memiliki Upah Minimum Regional paling tinggi adalah Kabupaten Demak pada tahun 2015 sebesar Rp.1.535.000. Jumlah keseluruhan angka pada data dibagi dengan banyaknya data atau mean adalah sebesar Rp. 973.5433

Berdasarkan perhitungan variabel UMR dapat diketahui bahwa UMR tertinggi tahun 2011 sebesar Rp. 880.000.pada Kabupaten Semarang. Dan UMR terendah pada kabupaten Cilacap sebesar Rp. Rp. 718.666. Pada tahun 2012 UMR tertinggi sebesar Rp. 941.600.pada Kabupaten Semarang. Dan UMR terendah pada Kabupaten Cilacap sebesar Rp 773.000. Pada tahun 2013 UMR

tertinggi sebesar Rp. 1.051.000 pada Kabupaten Semarang. Dan UMR terendah pada Kabupaten Purworejo sebesar Rp. 849.000. Pada tahun 2014 UMR tertinggi sebesar Rp. 1.280.000 pada Kabupaten Demak. Dan UMR terendah pada Kabupaten Purworejo sebesar Rp. 910.000. Sedangkan pada tahun 2015 UMR tertinggi sebesar Rp. 1.535.000 pada Kabupaten Demak. Dan UMR terendah pada Kabupaten Banyumas sebesar Rp. 1.100.000

2. Pengangguran (X_2)

Menurut Sadono Sukirno pengangguran adalah suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Sedangkan seseorang yang tidak bekerja, tetapi tidak secara aktif mencari pekerjaan tidak digolongkan sebagai penganggur.⁸ Berikut ini jumlah pengangguran Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2011-2015 yang digunakan sebagai sampel penelitian :

Tabel 4.3

Pengangguran Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2015

No	Wilayah Jawa Tengah	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (Persen)				
		2011	2012	2013	2014	2015
	Provinsi Jawa Tengah	7.07	5.61	6.01	5.68	4.99
1	Kabupaten Cilacap	10.82	7.29	6.68	5.65	8.01
2	Kabupaten Banyumas	6.61	5.11	5.45	5.37	6.37
3	Kabupaten Purbalingga	5.1	5.02	5.63	5.13	4.84
4	Kabupaten Purworejo	5.3	3.2	5.15	5.1	4.01
5	Kabupaten Wonosobo	4.92	5.21	5.82	5.34	4.47
6	Kabupaten Magelang	6.83	4.38	6.13	7.45	5.16
7	Kabupaten Boyolali	5.81	4.43	5.44	4.95	2.03
8	Kabupaten Klaten	7.63	3.7	5.34	4.75	2.51
9	Kabupaten Sukoharjo	6.27	6.1	5.98	4.6	4.52
10	Kabupaten Karanganyar	5.78	5.82	3.84	3.54	3.6
11	Kabupaten Sragen	8.43	5.88	5.63	6.04	4.51
12	Kabupaten Blora	6.9	4.75	6.23	4.3	4.68
13	Kabupaten Rembang	7.22	5.75	5.97	5.23	4.51

⁸ Nur Baeti, *Pengaruh Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2011*, Economics Development Analysis Journal, Universitas Negeri Semarang, ISSN 2252-6889, 2013, hlm. 92

14	Kabupaten Pati	11.17	11.98	7.29	6.37	4.43
15	Kabupaten Kudus	8.32	5.89	8.07	5.03	5.04
16	Kabupaten Jepara	5.48	4.29	6.34	5.09	3.12
17	Kabupaten Demak	5.03	8.4	7.08	5.17	6.02
18	Kabupaten Semarang	6.16	4.87	3.9	4.38	2.57
19	Kabupaten Temanggung	3.54	3.39	4.87	3.19	1.5
20	Kabupaten Kendal	6.54	6.31	6.43	6.15	7.07
21	Kabupaten Batang	6.66	5.88	7.02	7.42	4.56
22	Kabupaten Pekalongan	6.91	5.08	4.78	6.03	5.1

Sumber : Data Publikasi BPS Jawa Tengah, tahun 2018 (diolah).

Hasil SPSS pada tabel 4.1 menunjukkan bahwa data yang digunakan sebagai sampel penelitian adalah sebanyak 110 data. Selama tahun 2011-2015, Kabupaten Temanggung yang memiliki jumlah pengangguran paling kecil pada tahun 2015 yaitu sebesar Rp. 1.50 % Sedangkan yang memiliki jumlah pengangguran paling tinggi adalah Kabupaten Pati pada tahun 2012 sebesar 11.98 %. Jumlah keseluruhan angka pada data dibagi dengan banyaknya data atau mean adalah sebesar 558.31%

Berdasarkan perhitungan variabel pengangguran dapat diketahui bahwa pengangguran tertinggi tahun 2011 sebesar 11.17% pada Kabupaten Pati. Dan pengangguran terendah pada Kabupaten Temanggung sebesar 3.54%. Pada tahun 2012 pengangguran tertinggi sebesar 11.98% pada Kabupaten Pati. Dan pengangguran terendah pada Kabupaten Purworejo sebesar 3.2%. Pada tahun 2013 pengangguran tertinggi sebesar 8.07% pada Kabupaten Kudus. Dan pengangguran terendah pada Kabupaten Kebumen sebesar 3.52%. Pada tahun 2014 pengangguran tertinggi sebesar 7.45% pada Kabupaten Magelang. Dan pengangguran terendah pada Kabupaten Temanggung sebesar 3.19%. Sedangkan pada tahun 2015 pengangguran tertinggi sebesar 8.01% pada Kabupaten Cilacap. Dan pengangguran terendah pada Kabupaten Temanggung sebesar 1.5%

3. Produk Domestik Regional Bruto (X_3)

PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.⁹ Berikut ini data PDRB (perkapita) Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2011-2015 yang digunakan sebagai sampel penelitian:

Tabel 4.4
PDRB (Perkapita) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2015 (Juta Rupiah)

No	Kabupaten/ Kota	2011	2012	2013	2014	2015
1	Cilacap	47.20561056	47.83496596	48.34005545	49.47198	52.13091
2	Banyumas	15.5899393	16.34169946	17.31028782	18.11957	19.0505
3	Purbalingga	13.33087946	13.94545565	14.5227886	15.06763	15.72372
4	Purworejo	12.8541456	13.38627782	13.99091736	14.56617	15.29682
5	Wonosobo	12.47266196	12.98619331	13.43099919	14.0009	14.61015
6	Magelang	12.80232558	13.28758047	13.93233346	14.5386	15.12518
7	Boyolali	15.53963308	16.25573299	17.09008706	17.90178	18.84526
8	Klaten	15.88029814	16.70263493	17.6165307	18.56499	19.46762
9	Sukoharjo	20.76906953	21.79001615	22.8420911	23.86503	25.00799
10	Karanganyar	20.89233037	21.90125469	22.91899452	23.88521	24.86141
11	Sragen	19.52625044	20.6224065	21.90639781	23.03504	24.33471
12	Blora	12.67996316	13.23	13.87203369	14.41229	15.11849
13	Rembang	14.72746068	15.37040795	16.0632205	16.74786	17.52381
14	Pati	16.55292785	17.4151333	18.33413577	19.06426	20.07669
15	Kudus	69.85383116	71.76486158	73.92	76.23918	78.23988
16	Jepara	12.53	13.0544473	13.54673926	13.9861	14.4749
17	Demak	11.4693286	11.84595911	12.33374887	12.72673	13.34088
18	Semarang	24.21428641	25.30639695	26.44258745	27.60652	28.74418
19	Temanggung	14.35954986	14.82152736	15.43780045	16.06169	16.74186
20	Kendal	22.0017203	22.93835787	30.68311356	25.18313	26.28886
21	Batang	14.0111259	14.51496635	15.22044102	15.87773	16.58983
22	Pekalongan	12.78537756	13.28991463	13.9756782	14.55613	15.14276

Sumber : Data Publikasi BPS Jawa Tengah, tahun 2018 (diolah).

Hasil SPSS pada tabel 4.1 menunjukkan bahwa yang menjadi sampel penelitian adalah sebanyak 110 data. Selama tahun 2011-2015, Kabupaten Demak yang memiliki jumlah PDRB paling kecil pada tahun 2011 yaitu sebesar Rp. 11.47 Sedangkan yang memiliki jumlah

⁹ Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, *Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Menurut Pengeluaran Jawa Tengah 2011-2015*, Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, Semarang, t.th.,hlm. 3

PDRB paling tinggi adalah Kabupaten Kudus pada tahun 2015 sebesar 78.24. Jumlah keseluruhan angka pada data dibagi dengan banyaknya data atau mean adalah sebesar 21.333

Berdasarkan perhitungan variabel PDRB dapat diketahui bahwa PDRB tertinggi selama tahun 2011-2015 dicapai oleh satu kabupaten yaitu masing-masing sebesar 69.8538; 71.76486; 73.92; 76.23918; dan 78.23988 pada Kabupaten Kudus. Sedangkan selama tahun 2011-2015 PDRB terendah juga dicapai pada satu kabupaten yaitu Demak masing-masing sebesar 11.469; 11.846; 12.334; 12.727; dan 13,341

4. Indeks Pembangunan Manusia (Y)

Indeks pembangunan manusia (IPM), atau dikenal dengan sebutan *Human Development Index* (HDI) adalah suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia di suatu wilayah. IPM mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup.¹⁰ Berikut ini capaian IPM di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2011-2015 yang digunakan sebagai sampel penelitian :

Tabel 4.5
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2011-2015

No	Wilayah Jawa Tengah	Indeks Pembangunan Manusia				
		2011	2012	2013	2014	2015
	Provinsi Jawa Tengah	66.64	67.21	68.02	68.78	69.49
1	Kab. Cilacap	64.73	65.72	66.8	67.25	67.77
2	Kab. Banyumas	67.45	68.06	68.55	69.25	69.89
3	Kab. Purbalingga	64.33	64.94	65.53	66.23	67.03
4	Kab. Purworejo	69.11	69.4	69.77	70.12	70.37
5	Kab. Wonosobo	63.07	64.18	64.57	65.2	65.7
6	Kab. Magelang	64.16	64.75	65.86	66.35	67.13
7	Kab. Boyolali	69.14	69.51	69.81	70.34	71.74
8	Kab. Klaten	71.16	71.71	72.42	73.19	73.81
9	Kab. Sukoharjo	72.34	72.81	73.22	73.76	74.53
10	Kab. Karanganyar	71	72.26	73.33	73.89	74.26
11	Kab. Sragen	68.12	68.91	69.95	70.52	71.1
12	Kab. Blora	63.88	64.7	65.37	65.84	66.22

¹⁰ Badan Pusat Statistik, *Indeks Pembangunan Manusia 2014*, Badan Pusat Statistik, Jakarta, 2015, hlm. 10

13	Kab. Rembang	65.36	66.03	66.84	67.4	68.18
14	Kab. Pati	65.71	66.13	66.47	66.99	68.51
15	Kab. Kudus	69.89	70.57	71.58	72	72.72
16	Kab. Jepara	67.63	68.45	69.11	69.61	70.02
17	Kab. Demak	66.84	67.55	68.38	68.95	69.75
18	Kab. Semarang	70.35	70.88	71.29	71.65	71.89
19	Kab. Temanggung	64.14	64.91	65.52	65.97	67.07
20	Kab. Kendal	66.96	67.55	67.98	68.46	69.57
21	Kab. Batang	62.59	63.09	63.6	64.07	65.46
22	Kab. Pekalongan	64.72	65.33	66.26	66.98	67.4

Sumber : Data Publikasi BPS Jawa Tengah, tahun 2018 (diolah)

Hasil SPSS pada tabel 4.1 menunjukkan bahwa yang menjadi sampel penelitian adalah sebanyak 110 data. Selama tahun 2011-2015, Kabupaten Batang yang memiliki IPM paling kecil pada tahun 2011 yaitu sebesar Rp. 62,59. Sedangkan yang memiliki IPM paling tinggi adalah Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2015 sebesar 74.53. Jumlah keseluruhan angka pada data dibagi dengan banyaknya data atau mean adalah sebesar 68.241.

Berdasarkan perhitungan variabel IPM dapat diketahui bahwa IPM tertinggi selama tahun 2011-2015 dicapai oleh Kabupaten Sukoharjo yaitu masing-masing sebesar 72.34; 72.81; 73.22; 73.76; dan 74.53.

Sedangkan selama tahun 2011-2014 IPM terendah juga dicapai pada Kabupaten Batang yaitu masing-masing sebesar 62.59; 63.09; 63.6; 64.07; dan 65.46.

C. Uji Asumsi Klasik

Untuk mengetahui apakah suatu data dapat dianalisa lebih lanjut diperlukan suatu uji asumsi klasik agar hasil dan analisa nantinya efisien dan tidak bias. Adapun kriteria pengujian tersebut sebagai berikut :

1. Uji Multikolonieritas

Pengujian multikolonieritas dilakukan untuk mengetahui apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi

diantara variabel bebas.¹¹ Cara untuk mendeteksi multikolonieritas dilakukan dengan menggunakan nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) dan *tolerance*. Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Pedoman yang dipakai untuk satu model regresi yang menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai *tolerance* $\leq 0,10$ atau sama dengan nilai VIF ≥ 10 .¹² Untuk masing-masing variabel terdapat pada tabel 4.6 :

Tabel 4.6:
Hasil Uji Multikolonieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
UMR	.829	1.206
PENGANGGURAN	.825	1.212
PDRB	.891	1.122

Sumber: Data SPSS diolah (2018)

Multikolinieritas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan lawannya *variance inflation factor* (VIF). Nilai VIF untuk variabel UMR 1.206 dengan toleransi 0.829, Nilai VIF untuk variabel pengangguran 1.212 dengan toleransi 0.825 , dan VIF variabel PDRB 1.122 dengan toleransi 0.891. Dari tabel diatas terlihat pada uji multikolinieritas menunjukkan bahwa variabel bebas memiliki toleransi lebih dari 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10, sehingga semua variabel bebas tidak terjadi multikolinieritas atau terbebas dari adanya multikolinieritas.

2. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena

¹¹ Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2011, hlm. 105

¹² *Ibid.*, hlm. 106

observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Model regresi yang baik adalah model regresi yang bebas dari autokorelasi.¹³

Untuk dapat mengetahui ada tidaknya autokorelasi, dapat dilihat dari nilai uji *Durbin-Watson* dengan ketentuan sebagai berikut: ¹⁴

Hipotesis Nol	Keputusan	Jika
Tidak ada autokorelasi positif	Tolak No decision	$0 < d < dl$ $dl \leq d \leq du$
Tidak ada autokorelasi positif	Tolak No decision	$4 - dl < d < 4$ $4 - du \leq d \leq 4 - dl$
Tidak ada korelasi negatif	Tidak ditolak	$du < d < 4 - du$
Tidak ada korelasi negatif		
Tidak ada autokorelasi, positif atau negative		

Sumber: Imam Ghazali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*, 2011, hlm. 111

Tabel 4.7:
Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.491 ^a	.241	.220	2.59643	1.311

Sumber: Data SPSS diolah (2018)

Nilai D-W sebesar 1.311, nilai tersebut akan dibandingkan dengan nilai tabel menggunakan nilai signifikansi 5% dengan jumlah sampel 110 (n) dan jumlah variabel bebas 3 (k = 3), maka dalam tabel Durbin-Watson akan didapatkan nilai sebagai berikut :

Tabel 4.8
Tabel Durbin-Watson Test Bound

N	K = 3	
	dL	dU
110	1,6336	1,7455

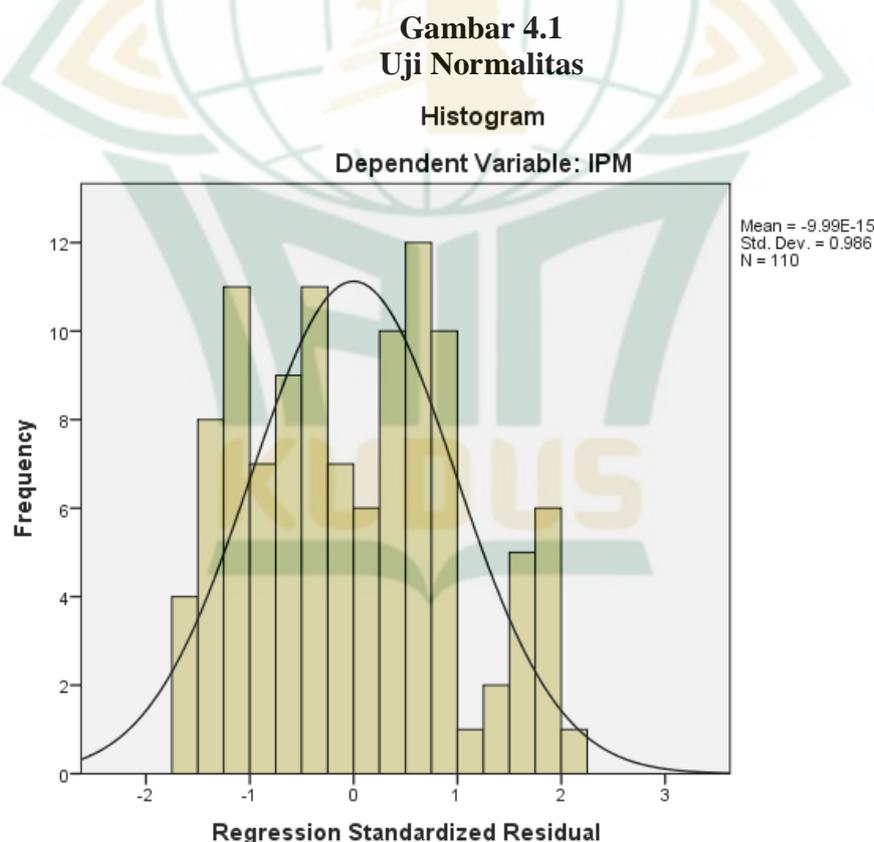
¹³ Masrukhin, *Metode Penelitian Kuantitatif*, STAIN Kudus, Kudus, 2009, hlm. 183

¹⁴ Imam Ghazali, *Op.Cit.*, hlm. 111

Dengan tabel tersebut dapat ditafsirkan bahwa nilai DW 1,311 lebih besar dari 0 dan kurang dari 1,7455 (dl). Jadi penelitian tersebut membuktikan bahwa model memenuhi asumsi autokorelasi ($0 < d < dl$) atau tidak terdapat autokorelasi positif pada model regresi.

3. Uji Normalitas

Uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi data secara normal atau mendekati normal. Untuk menguji apakah sampel penelitian jenis ini berdistribusi normal atau tidak maka digunakan analisis grafik dengan melihat grafik histogram.¹⁵ Berikut hasil uji normalitas dengan menggunakan grafik histogram:



Sumber: Data SPSS diolah (2018)

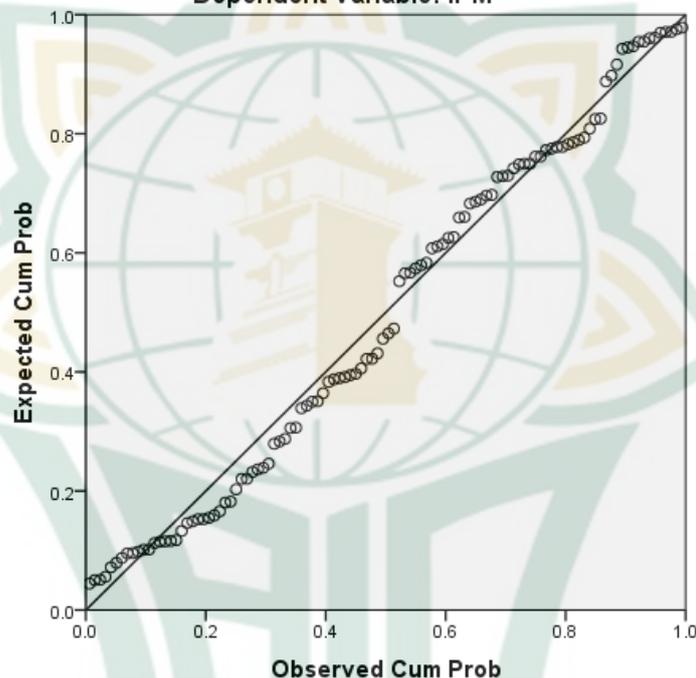
¹⁵ *Ibid.*, hlm. 160

Berdasarkan grafik histogram tersebut, menunjukkan bahwa data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Gambar 4.2
Uji Normalitas

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: IPM



Sumber: Data SPSS diolah (2018)

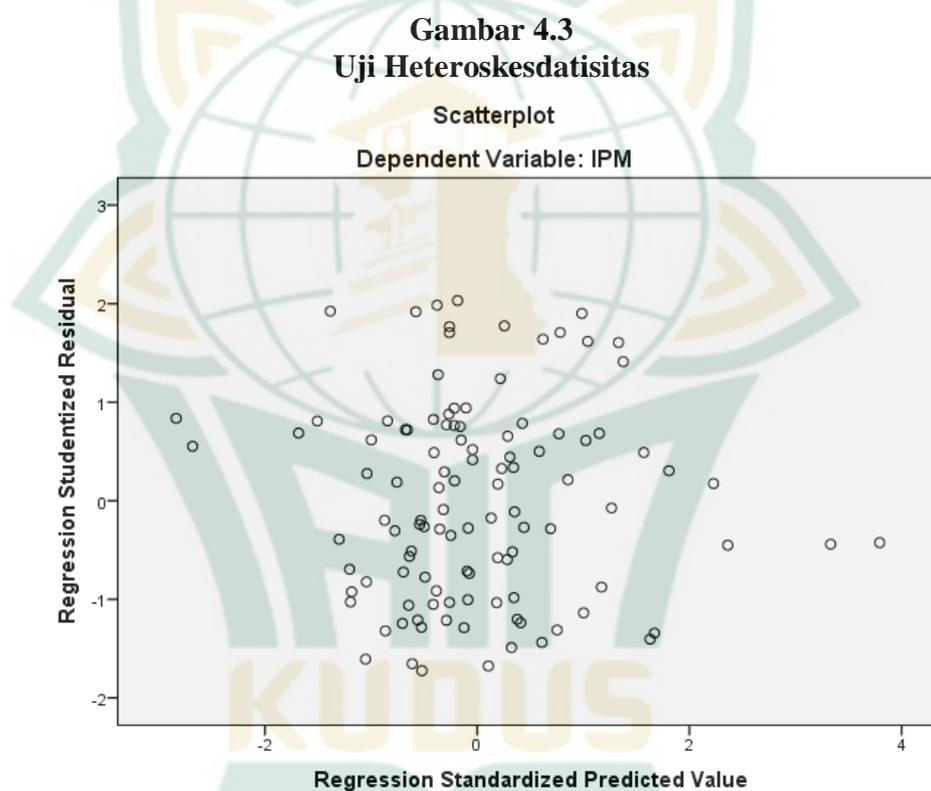
Berdasarkan grafik normal plot terlihat titik-titik menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka dapat diambil kesimpulan bahwa model regresi ini lulus uji normalitas karena grafik normal plot menunjukkan pola distribusi normal.

4. Uji Heteroskedastisitas

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas bisa dengan melihat grafik plot antara lain nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola

tertentu pada grafik *scatterplot* antara SRESID dan ZPRED. Dengan dasar analisisnya:

- a. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
- b. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik yang menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.¹⁶



Sumber: Data SPSS diolah (2018)

Berdasarkan grafik *Scatterplot* tersebut menunjukkan bahwa tidak dapat pola yang jelas serta titik menyebar secara acak yang tersebar di atas dan dibawah angka 0 (nol) pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk menganalisis pengaruh UMR, pengangguran, dan PDRB terhadap IPM di Jawa Tengah tahun 2011-2015.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 139

D. Analisis Data

1. Analisis Regresi Linear Berganda

Hasil analisis regresi berganda dapat dilihat dari tabel 4.9 dengan persamaan regresi sebagai berikut :

Tabel 4.9
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	67.476	1.962		34.393	.000
UMR	.002	.002	.137	1.478	.142
PENGANGGURAN	-.546	.166	-.306	-3.287	.001
PDRB	.075	.019	.355	3.963	.000

Sumber: Data SPSS diolah (2018)

Dari tabel diatas dapat diperoleh persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$$

$$Y = 67.476 + 0.002X_1 - 0.546X_2 + 0.075X_3$$

Y = Indeks Pembangunan Manusia

X₁ = Besarnya UMR

X₂ = Tingkat pengangguran

X₃ = PDRB

Berdasarkan nilai koefisien regresi dari variabel-variabel yang mempengaruhi IPM dengan menggunakan tingkat signifikansi α 0.05 dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

- Konstanta (a) = Sering disebut dengan *intercept* atau titik potong X dengan Y yang mempunyai nilai sebesar 67.476. Berarti jika tidak ada pengaruh variabel bebas yang terdiri dari UMR, pengangguran dan PDRB yang mempengaruhi IPM, maka nilai IPM sebesar 67.476.
- Koefisien (b1) = Variabel UMR mempunyai pengaruh positif terhadap IPM, dengan koefisien regresi sebesar 0.002. Artinya variabel UMR mempunyai pengaruh searah terhadap IPM, hal ini berarti setiap terjadi

kenaikan UMR 1000 maka IPM juga akan meningkat sebesar 0,002 poin dengan asumsi variabel lainnya konstan.

- c. Koefisien (b₂) = Variabel pengangguran mempunyai pengaruh negatif terhadap IPM dengan koefisien regresi sebesar - 0.546. Artinya variabel pengangguran mempunyai pengaruh yang tidak searah terhadap IPM, hal ini berarti setiap kenaikan pengangguran sebesar 1% maka IPM akan turun sebesar 0.546 poin dengan asumsi variabel lainnya konstan.
- d. Koefisien (b₃) = Variabel PDRB mempunyai pengaruh positif terhadap IPM, dengan koefisien regresi sebesar 0.075. Artinya variabel PDRB mempunyai pengaruh searah terhadap IPM, hal ini berarti setiap terjadi kenaikan PDRB sebesar 1000 maka IPM akan meningkat sebesar 0,075 poin dengan asumsi variabel lainnya konstan.

2. Koefisien Determinasi (*R Square*)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.¹⁷ Berikut ini hasil uji koefisien determinasi :

¹⁷ Mudrajad Kuncoro, *Metode Kuantitatif*, Unit Penerbit, Yogyakarta, 2001, hlm. 100

Analisis Koefisien Determinasi (*R Square*)
Tabel 4.10

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.491 ^a	.241	.220	2.59643

Sumber: Data SPSS diolah (2018)

Berdasarkan *output* diatas, nilai R square (R^2) = 0,220, hal ini menunjukkan bahwa sebesar 22,0% perubahan yang terjadi pada IPM dikontribusikan oleh UMR, Pengangguran dan PDRB. Sedangkan sisanya sebesar sebesar 78,0% di kontribusikan oleh variabel lain diluar penelitian.

3. Uji Parsial (Uji t)

Dalam rangka pengujian hipotesis bahwa variabel UMR, pengangguran, dan PDRB berpengaruh signifikan secara parsial terhadap IPM digunakan uji t. Untuk mengetahui apakah hepotesa yang diajukan signifikansi atau tidak, maka perlu membandingkan antara T_{hitung} dengan T_{tabel} dengan ketentuan :

- a. Jika $T_{hitung} > T_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima
- b. Jika $T_{hitung} < T_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak

Pengambilan keputusan uji t parsial, dikatakan variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen secara parsial jika nilai *output* SPSS pada kolom *coefficient* untuk melihat t hitung menunjukkan nilai lebih besar dari t table ($t_{hitung} > t_{table}$) dengan ketentuan t tabel menggunakan derajat kebebasan = jumlah sampel dan nilai $\alpha = 0.05$.¹⁸

¹⁸ *Ibid.*, hlm 98-99

Tabel 4.11
Hasil Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	67.476	1.962		34.393	.000
UMR	.002	.002	.137	1.478	.142
PENGANGGURAN	-.546	.166	-.306	-3.287	.001
PDRB	.075	.019	.355	3.963	.000

Sumber: Data SPSS diolah (2018)

Secara lebih rinci t_{hitung} dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

Variabel	T_{hitung}	T_{tabel}	Sig.	Interpretasi
UMR	1.478	1.983	0.142	Tidak berpengaruh
Pengangguran	-3.287	1.983	0.001	Berpengaruh
PDRB	3.963	1.983	0.000	Berpengaruh

Sumber: Data SPSS diolah (2018)

a. Pengujian Pengaruh Variabel UMR (X1) terhadap Variabel IPM (Y)

Dengan pengujian dua arah yang menggunakan tingkat signifikansi sebesar $\alpha = 0,05/2 = 0,025$ dan dengan derajat kebebasan $df (n-k) = 110 - 4 = 106$ diperoleh $t_{tabel} = 1,983$. Dari hasil perhitungan pada tabel 4.11 diperoleh t_{hitung} sebesar 1.478, sehingga $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($1,478 < 1,983$), dengan demikian H_1 ditolak. Artinya tidak terdapat pengaruh UMR terhadap Indeks Pembangunan Manusia periode tahun 2011-2015 di Provinsi Jawa Tengah dari persepektif Ekonomi Syariah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai koefisien signifikansi sebesar 0.142. Hal ini berarti bahwa signifikansi lebih besar dari 0,05 ($0,142 > 0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa UMR tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia periode tahun 2011-2015 di Provinsi Jawa Tengah dari persepektif Ekonomi Syariah.

b. Pengujian Pengaruh Variabel Pengangguran (X2) terhadap Variabel IPM (Y)

Dengan pengujian dua arah yang menggunakan tingkat signifikansi sebesar $\alpha = 0,05/2 = 0.025$ dan dengan derajat kebebasan $df (n-k) = 110 - 4 = 106$ diperoleh t tabel = 1.983. Dari hasil perhitungan pada tabel 4.11 diperoleh t hitung sebesar -3.287. Karena nilai t hitung bernilai negatif, maka pengambilan keputusannya adalah dikatakan berpengaruh jika nilai t hitung lebih kecil daripada t tabel. Dengan demikian t hitung kurang dari t tabel ($-3.287 < -1.983$) dengan demikian H_2 diterima. Artinya terdapat pengaruh negatif pengangguran terhadap Indeks Pembangunan Manusia periode tahun 2011-2015 di Provinsi Jawa Tengah dari persepektif Ekonomi Syariah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai koefisien signifikansi sebesar 0.001. Hal ini berarti bahwa signifikansi kurang dari 0,05 ($0.0001 < 0.05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa pengangguran berpengaruh negatif signifikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia periode tahun 2011-2015 di Provinsi Jawa Tengah dari persepektif Ekonomi Syariah.

c. Pengujian Pengaruh Variabel PDRB (X3) terhadap Variabel IPM (Y)

Dengan pengujian dua arah yang menggunakan tingkat signifikansi sebesar $\alpha = 0,05/2 = 0.025$ dan dengan derajat kebebasan $df (n-k) = 110 - 4 = 106$ diperoleh t tabel = 1.983. Dari hasil perhitungan pada tabel 4.11 diperoleh t hitung sebesar 3.963, sehingga $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3.963 > 1.983$), dengan demikian H_3 diterima. Artinya terdapat pengaruh PDRB terhadap Indeks Pembangunan Manusia periode tahun 2011-2015 di Provinsi Jawa Tengah dari persepektif Ekonomi Syariah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai koefisien signifikansi sebesar 0.000. Hal ini berarti bahwa signifikansi kurang dari 0,05 ($0.000 < 0.05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa PDRB berpengaruh

signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia periode tahun 2011-2015 di Provinsi Jawa Tengah dari persepektif Ekonomi Syariah.

4. Uji Statistik F

Dalam rangka pengujian hipotesis bahwa variabel UMR, pengangguran, dan PDRB berpengaruh signifikan secara simultan terhadap IPM digunakan uji F. Untuk mengetahui apakah hepotesa yang diajukan signifikansi atau tidak, maka perlu membandingkan antara F_{hitung} dengan F_{tabel} dengan ketentuan :

- a. Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_1 , H_2 , H_3 dan H_4 diterima.
- b. Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_1 , H_2 , H_3 dan H_4 ditolak.
- c. Adapun kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut :
 - 1) Taraf signifikansi = 0,05 ($\alpha = 5\%$)
 - 2) Derajat kebebasan (*degree of freedom*) $df = n-k$
 - 3) F tabel yang nilainya dari daftar tabel distribusi F.¹⁹

Tabel 4.12
Hasil Uji F

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	227.034	3	75.678	11.226	.000 ^b
Residual	714.594	106	6.741		
Total	941.628	109			

Sumber: Data SPSS diolah (2018)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen yaitu UMR, pengangguran dan PDRB secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu IPM. Hasil perhitungan Uji F terlihat bahwa nilai F_{hitung} sebesar 11.226 dengan nilai signifikan 0,000. Sedangkan F_{tabel} sebesar 2,69 (Probabilitas 0,05, $df_1 = 3$,

¹⁹ Imam Ghozali., *Op.Cit.*, hlm 98

$df_2 = 106$), $F_{hitung} > F_{tabel}$, $= 11.226 > 2.69$ hal ini menunjukkan bahwa secara simultan variabel UMR, pengangguran, PDRB berpengaruh terhadap IPM.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa (H4) diterima, artinya terdapat pengaruh signifikan antara UMR, pengangguran, PDRB terhadap IPM.

E. Pembahasan

1. Pengaruh UMR terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($1.478 < 1.983$), dengan nilai koefisien signifikansi lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0.0142. Sehingga UMR tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia periode tahun 2011-2015 di Provinsi Jawa Tengah.

Menurut peraturan Menteri Tenaga Kerja tentang Upah Minimum pasal 1, upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. Upah minimum ditetapkan berdasarkan standar layak hidup dengan memperhatikan produktivitas pertumbuhan ekonomi.²⁰ Upah minimum adalah usaha untuk mengangkat derajat penduduk berpendapatan rendah, terutama pekerja miskin. Tujuan utama ditetapkannya upah minimum adalah memenuhi standar hidup minimum seperti untuk kesehatan, efisiensi, dan kesejahteraan pekerja. Selain itu penetapan upah minimum juga bertujuan untuk pemerataan pendapatan, peningkatan daya beli pekerja dan perluasan kesempatan kerja.²¹

Dengan adanya upah minimum yang telah ditetapkan berdasarkan kebutuhan hidup layak, diharapkan masyarakat mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka sehingga akan tercipta kesejahteraan. Jika tingkat UMR memenuhi kebutuhan manusia, maka

²⁰ Joni Bambang, *Hukum Ketenagakerjaan*, Pustaka Setia, Bandung, 2013, hlm. 172-173

²¹ Syahrina Syam dan Abdul Wahab, *Pengaruh Upah dan Pertumbuhan Penduduk terhadap Tingkat Pengangguran di Kota Makassar*, No.1, Vol. 1, 2015, hlm. 38

masyarakat juga akan mampu untuk memperoleh pendidikan sehingga akan tercipta penduduk yang melek pendidikan dan mengurangi angka putus sekolah. Hal tersebut sesuai dengan konsep IPM dipublikasikan melalui UNDP melalui *Human Development Report* tahun 1990, terkait dengan pembangunan manusia. Pembangunan manusia didefinisikan sebagai “*a process of enlarging people’s choices* atau proses yang meningkatkan aspek kehidupan masyarakat. Aspek terpenting kehidupan ini dilihat dari usia yang panjang dan hidup sehat, tingkat pendidikan yang memadai dan standar hidup yang layak.²² Akan tetapi UMR ini tidak berpengaruh terhadap IPM hal tersebut dikarenakan perbedaan jumlah UMR yang ada di setiap wilayah. Sehingga UMR tidak dapat dijadikan sebagai faktor yang dapat mempengaruhi naik dan turunnya IPM.

Di dalam Al-Qur’an tidak dijelaskan secara langsung mengenai pengangguran menurut Islam, tetapi dalam Al-Qur’an memberi penekanan utama terhadap pekerjaan dan menerangkan dengan jelas bahwa manusia diciptakan di bumi ini adalah untuk bekerja keras mencari penghidupan masing-masing. Sehingga didalam Islam terdapat peringatan agar manusia tidak menganggur, Allah berfirman dalam QS. An-Naba ayat 4 :

وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ۝ ١١

Artinya : “dan Kami jadikan siang untuk mencari penghidupan”.

Dalam ayat tersebut dikatakan bahwa dijadikannya siang untuk mencari penghidupan. Ini menunjukkan supaya manusia hendaknya bekerja untuk menanggung segala kebutuhannya dalam perjuangannya untuk mencapai kemajuan..²³

Didalam Islam prinsip mengenai upah hampir sama dengan prinsip yang ada didalam UU Ketenagakerjaan mengenai pemberian

²² Edy Suandi Hamid, *Ekonomi Indonesia dari Sentralisasi ke Desentralisasi*, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, 2006, hlm. 85

²³ Nurul Huda dkk, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan dan Teoretis*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 228

upah. Jadi upah yang diberikan kepada pekerja haruslah sesuai dengan standar kehidupan yang layak, sehingga kesejahteraan manusia dapat tercapai. Hal itulah yang menjadikan pentingnya penetapan Upah Minimum Regional.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dianalisis bahwa variabel UMR tidak berpengaruh terhadap IPM, hal tersebut dikarenakan perbedaan upah yang terjadi antar wilayah karena kebutuhan hidup layak setiap daerah berbeda-beda. Jadi UMR tidak memberikan pengaruh secara langsung terhadap IPM. Akan tetapi di dalam Islam pemberian upah sesuai dengan prinsip dasar pemberian upah dalam Islam yaitu pertengahan, moderat dalam penentuan upah tidak berlebih-lebihan atau terlalu sedikit. Tujuan utama pemberian upah tersebut agar mampu memenuhi segala kebutuhan pokok hidup. Dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa kenaikan UMR tidak berpengaruh langsung terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Hasil penelitian ini berbanding terbalik dengan hasil penelitian Nursiah Chalid dan Yusbar Yusuf, yang berjudul Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Laju Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau, dengan hasil penelitian tidak terdapat pengaruh UMR terhadap IPM.²⁴

2. Pengaruh Pengangguran terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($-3.287 < -1.983$), karena nilai t hitung bernilai negatif, maka pengambilan keputusannya berpengaruh jika nilai t hitung lebih kecil daripada t tabel. Sedangkan diperoleh koefisien signifikansi kurang dari 0,05 yaitu sebesar 0.0001. Sehingga pengangguran berpengaruh negatif

²⁴ Nursiah Chalid dan Yusbar Yusuf, "Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Laju Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau", Jurnal Ekonomi, Universitas Riau, Volume 22 Nomor 2, 2014, hlm. 11-12

signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia periode tahun 2011-2015 di Provinsi Jawa Tengah. Dari persamaan diketahui variabel pengangguran menunjukkan koefisien regresi sebesar -0.546 . Artinya variabel pengangguran mempunyai pengaruh yang tidak searah terhadap IPM, hal ini berarti setiap terjadi kenaikan pengangguran sebesar 1% maka akan menurunkan IPM sebesar 0.546 poin.

Menurut Sadono Sukirno pengangguran adalah suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Sedangkan seseorang yang tidak bekerja, tetapi tidak secara aktif mencari pekerjaan tidak digolongkan sebagai penganggur. Pengangguran juga dapat memberikan dampak sosial yang tidak baik misalnya semakin meningkatnya tindakan kriminal dan pelanggaran moral.²⁵ Tingginya tingkat pengangguran akan menimbulkan berbagai dampak yang bersifat negatif, baik terhadap kestabilan ekonomi maupun terhadap kestabilan sosial dan politik.²⁶ Salah satu dampak dari adanya pengangguran adalah tingkat kesejahteraan masyarakat menurun, karena mereka kehilangan mata pencaharian. Tingginya jumlah pengangguran mencerminkan buruknya perekonomian suatu wilayah.²⁷ Oleh karena itu naiknya tingkat pengangguran menyebabkan angka kemiskinan semakin meningkat sehingga kesejahteraan masyarakat tidak dapat terpenuhi. Dan jika tingkat kesejahteraan menurun maka pembangunan manusia juga akan menurun, karena salah satu indikator dari pembangunan manusia adalah terpenuhinya standar hidup layak.

²⁵ Nur Baeti, *Pengaruh Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2011*, Economics Development Analysis Journal, Universitas Negeri Semarang, ISSN 2252-6889, 2013, hlm. 92

²⁶ Asfia Murni, *Ekonomika Makro Edisi Revisi*, Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 200-201

²⁷ *Ibid.*, hlm. 201

Di dalam Al-Qur'an tidak dijelaskan secara langsung mengenai pengangguran menurut Islam, tetapi dalam Al-Qur'an memberi penekanan utama terhadap pekerjaan dan menerangkan dengan jelas bahwa manusia diciptakan di bumi ini adalah untuk bekerja keras mencari penghidupan masing-masing. Sehingga didalam Islam terdapat peringatan agar manusia tidak menganggur, Allah berfirman dalam QS. An-Naba ayat 4 :

وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ۝ ۱۱

Artinya : “dan Kami jadikan siang untuk mencari penghidupan”.

Dalam ayat tersebut dikatakan bahwa dijadikannya siang untuk mencari penghidupan. Ini menunjukkan supaya manusia hendaknya bekerja untuk menanggung segala kebutuhannya dalam perjuangannya untuk mencapai kemajuan..²⁸ Sehingga dapat dikatakan bahwa di dalam islam juga melarang seseorang untuk menjadi pengangguran dan tidak bekerja. Karena pengangguran menjadikan manusia tidak dapat berkembang dan bergantung kepada orang lain. Sehingga semakin bertambahnya pengangguran maka akan menyebabkan pembangunan manusia turun.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pengangguran juga berkaitan erat dengan kualitas pembangunan manusia. Jumlah pengangguran yang tinggi akan mengakibatkan kemakmuran kehidupan masyarakat berkurang. Pengangguran juga mengakibatkan pendapatan mereka berkurang. Pendapatan dalam hal ini merupakan faktor yang dominan dalam peningkatan pembangunan manusia. Oleh karena itu, pemerintah perlu ikut andil dalam mengurangi jumlah pengangguran yang ada pada daerah, sehingga pencapaian pembangunan manusia dapat tercapai.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Nur Baeti, yang berjudul Pengaruh Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, dan

²⁸ Nurul Huda dkk, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan dan Teoretis*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 228

Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2011 dengan hasil penelitian terdapat pengaruh negatif pengangguran terhadap IPM.²⁹ Serta penelitian Nursiah Chalid dan Yusbar Yusuf, yang berjudul Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Laju Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau, menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif pengangguran terhadap IPM.³⁰

Variabel pengangguran merupakan variabel dengan tingkat signifikan yang terkecil yaitu sebesar 0,0001. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaruh variabel pengangguran paling kecil. Variabel diluar penelitian yang dapat mempengaruhi IPM salah satunya adalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan karena kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar atau sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Oleh karena itu tingkat kemiskinan dapat mempengaruhi IPM.³¹

Kemiskinan menjadi masalah dalam pembangunan yang dapat mempengaruhi IPM. Kemiskinan juga dapat menjadikan efek yang cukup serius bagi pembangunan manusia karena masalah kemiskinan

²⁹ Nur Baeti, "Pengaruh Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2011", *Economics Development Analysis Journal*, Universitas Negeri Semarang, ISSN 2252-6889, 2013, hlm. 94

³⁰ Nursiah Chalid dan Yusbar Yusuf, "Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Laju Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau", *Jurnal Ekonomi*, Universitas Riau, Volume 22 Nomor 2, 2014, hlm. 11-12

³¹ Nursiah Chalid dan Yusbar Yusuf, "Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Laju Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau", *Jurnal Ekonomi*, Universitas Riau, Volume 22 Nomor 2, 2014, hlm. 1-2

merupakan masalah yang kompleks yang bermula dari kemampuan daya beli masyarakat yang tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan pokok, sehingga kebutuhan lain seperti pendidikan dan kesehatan juga akan terabaikan. Sehingga menjadikan *gap* pembangunan manusia diantara keduanya menjadi besar dan pada akhirnya target capaian IPM yang ditentukan oleh pemerintah menjadi tidak terealisasikan dengan baik.³² Hal tersebut dikarenakan IPM merupakan indeks komposisi yang didasarkan pada 3 indikator yaitu kesehatan, pendidikan dan standar hidup yang layak. Jika masyarakat masih berada pada lingkaran kemiskinan maka proses pembangunan manusia juga tidak berjalan dengan baik dan tidak dapat menaikkan IPM suatu wilayah.³³ hal tersebut diperkuat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Nursiah Chalid dan Yusbar Yusuf dengan judul Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Laju Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau, menunjukkan bahwa pengaruh negatif variabel kemiskinan terhadap IPM lebih besar daripada pengaruh variabel pengangguran terhadap IPM.³⁴

3. Pengaruh PDRB terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil $t_{hitung} > t_{tabel}$ (3.963 > 1.983), dengan nilai koefisien signifikansi kurang dari 0,05 yaitu sebesar 0.000. Sehingga PDRB berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia periode tahun 2011-2015 di Provinsi Jawa Tengah. Dari persamaan diketahui variabel PDRB menunjukkan

³² Denni Sulistio Mirza, "Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah Tahun 2006-2009", *Economics Development Analysis Jurnal*, Universitas Negeri Semarang, ISSN 2252-6560, 2012, hlm. 6-7

³³ Tulus T.H Tambunan, *Perekonomian Indonesia Beberapa Permasalahan Penting*, Ghalia Indonesia, Bogor, t.th., hlm. 167

³⁴ Nursiah Chalid dan Yusbar Yusuf, "Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Laju Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau", *Jurnal Ekonomi*, Universitas Riau, Volume 22 Nomor 2, 2014, hlm. 10

koefisien regresi sebesar 0.075. Artinya jika terjadi kenaikan PDRB sebesar 1000 maka IPM akan meningkat sebesar 0,075 poin.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk melihat kinerja perekonomian regional (daerah). Pada dasarnya, pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan *output* agregat (keseluruhan barang dan jasa yang dihasilkan oleh kegiatan perekonomian) atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan nilai total seluruh output akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian daerah, baik yang dilakukan oleh warga lokal maupun warga asing yang bermukim di negara bersangkutan. Sehingga, ukuran umum yang sering digunakan untuk melihat laju pertumbuhan ekonomi adalah persentase perubahan PDRB untuk skala provinsi atau kabupaten/kota.³⁵ Menurut Todaro salah satu karakteristik pertumbuhan ekonomi modern adalah tingginya pertumbuhan output per kapita. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi mengubah pola konsumsi karena peningkatan daya beli. Tingginya daya beli masyarakat akan meningkatkan IPM karena daya beli masyarakat merupakan salah satu indikator komposit dalam IPM yang disebut indikator pendapatan.³⁶

Terdapat tiga faktor atau indikator yang dijadikan tolak ukur oleh UNDP (*United Nation Development Programme*) akan keberhasilan suatu pembangunan yaitu lamanya hidup (kesehatan), rata-rata lama bersekolah dan angka melek huruf (pendidikan), dan standar hidup (ekonomi), Ketiga unsur ini juga mendapat perhatian yang cukup besar dalam Islam sebagai faktor penting dalam pembangunan manusia itu sendiri. Konsep pembangunan manusia seutuhnya merupakan konsep

³⁵ Nadia Ayu Bhakti, Istiqomah, dan Suprpto, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia Periode 2008-2012", Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Soedirman, Volume 18, Nomor 4, 2014, hlm. 456

³⁶ Nadia Ayu Bhakti, Istiqomah, dan Suprpto, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia Periode 2008-2012", Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Soedirman, Volume 18, Nomor 4, 2014, hlm. 454

yang menghendaki peningkatan kualitas hidup penduduk baik secara fisik, mental maupun spiritual. Pembangunan yang menitikberatkan pada pembangunan sumber daya manusia yang seiring dengan pertumbuhan ekonomi.³⁷ Pembangunan sumber daya manusia yang secara fisik dan mental mengandung makna peningkatan kapasitas penduduk yang kemudian akan memperbesar kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses untuk pembangunan berkelanjutan.³⁸

Berdasarkan hasil penelitian dapat dianalisis bahwa penelitian ini mendukung teori Todaro, yaitu salah satu karakteristik pertumbuhan ekonomi modern adalah tingginya pertumbuhan output per kapita. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi mengubah pola konsumsi karena peningkatan daya beli. Tingginya daya beli masyarakat akan meningkatkan IPM karena daya beli masyarakat merupakan salah satu indikator komposit dalam IPM yang disebut indikator pendapatan.³⁹ Dapat disimpulkan bahwa tingkat pembangunan manusia yang relatif tinggi akan mempengaruhi kinerja pertumbuhan ekonomi melalui kapabilitas penduduk dan kemudian akan meningkatkan produktivitas masyarakat. Dengan meningkatnya produktivitas tersebut maka pertumbuhan ekonomi (PDRB) juga akan naik. Dengan meningkatnya PDRB akan mengubah pola konsumsi karena peningkatan daya beli. Oleh karena itu, kenaikan nilai PDRB juga akan dibarengi dengan meningkatnya nilai IPM.

Pertumbuhan ekonomi dalam perspektif Islam tidak sekedar terkait dengan peningkatan volume barang dan jasa, namun juga terkait dengan aspek dan kualitas akhlak serta keseimbangan antara tujuan

³⁷ Karimatul Khasanah, "Hukum Ekonomi Syari'ah, Indeks Pembangunan Manusia, dan Kapitalisme Global (Revitaformasi Hukum Ekonomi Pembangunan Islam)", Jurnal Kajian Hukum Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol. IX Nomor 2, Desember 2015, hlm. 325

³⁸ Karimatul Khasanah, "Hukum Ekonomi Syari'ah, Indeks Pembangunan Manusia, dan Kapitalisme Global (Revitaformasi Hukum Ekonomi Pembangunan Islam)", Jurnal Kajian Hukum Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol. IX Nomor 2, Desember 2015, hlm. 326

³⁹ Nadia Ayu Bhakti, Istiqomah, dan Suprpto, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia Periode 2008-2012", Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Soedirman, Volume 18, Nomor 4, 2014, hlm. 454

duniawi dan ukhrawi. Ukuran pencapaian keberhasilan pertumbuhan ekonomi tidak semata-mata dilihat dari sisi pencapaian materi semata, namun juga ditinjau dari sisi perbaikan kehidupan agama, sosial dan kemasyarakatan. Namun jika pertumbuhan ekonomi yang terjadi tidak tercapai nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan, maka dipastikan pertumbuhan tersebut tidak sesuai dengan prinsip ekonomi syariah. Tiga faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi :

- a. *Investible resources* (SDA yang dapat diinvestasikan)
- b. SDM dan *entrepreneurship*
- c. Teknologi dan inovasi⁴⁰

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Nadia Ayu Bhakti, Istiqomah, Suprpto (2014) yang berjudul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia Periode 2008-2012 dengan hasil penelitian terdapat pengaruh positif PDRB terhadap IPM.⁴¹ Serta penelitian Ayunanda Melliana dan Ismaini Zain (2013) yang berjudul Analisis Statistika Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur dengan Menggunakan Regresi Panel dengan hasil penelitian tingkat terdapat pengaruh positif signifikan PDRB terhadap IPM.⁴²

4. Pengaruh UMR, Pengangguran, dan PDRB terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Berdasarkan hasil perhitungan Uji F diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 11.226 dengan nilai signifikan 0,000. Sedangkan F_{tabel} sebesar

⁴⁰ Irfan Syauqi B. & Laily Dwi Arsyianti, *Op.Cit*, hlm. 23

⁴¹ Nadia Ayu Bhakti, Istiqomah, dan Suprpto, "*Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia Periode 2008-2012*", Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Soedirman, Volume 18, No. 4, 2014, hlm. 467

⁴² Ayunanda Melliana dan Ismaini Zain, "*Analisis Statistika Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur dengan Menggunakan Regresi Panel*", Jurnal Sains dan Seni Pomits, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Vol. 2, No.2, 2013, hlm. 242

2,69 (Probabilitas 0,05, $df_1 = 3$, $df_2 = 106$), $F_{hitung} > F_{tabel}$, = 11.226 > 2.69 hal ini menunjukkan bahwa secara simultan variabel UMR, pengangguran, PDRB berpengaruh terhadap IPM. Hasil dari koefisien determinasi yaitu nilai R square (R^2) = 0,220, hal ini menunjukkan bahwa sebesar 22,0% IPM dipengaruhi oleh UMR, Pengangguran dan PDRB. Sedangkan sisanya sebesar sebesar 78,0% di kontribusikan oleh variabel lain diluar penelitian.

Dalam UU No. 13 Tahun 2003 telah ditegaskan bahwa setiap pekerja berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Sehingga dengan adanya upah minimum, kebutuhan minimum pekerja dapat terpenuhi. Semakin tinggi upah minimum suatu daerah maka tingkat kesejahteraan masyarakat juga semakin meningkat.⁴³ Pengangguran merupakan seseorang atau orang yang termasuk angkatan kerja dan sedang mencari pekerjaan tertentu. Efek buruk dari pengangguran adalah mengurangi pendapatan masyarakat yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemakmuran yang telah dicapai seseorang Apabila pengangguran disuatu daerah sangat buruk kekacauan sosial dan politik selalu berlaku dan menimbulkan efek yang buruk kepada kesejahteraan masyarakat dan prospek pembangunan ekonomi dalam jangka panjang. Jumlah pengangguran yang tinggi juga akan mengakibatkan kemakmuran kehidupan masyarakat berkurang.⁴⁴

Disamping itu, pembangunan manusia merupakan upaya yang dilakukan untuk memperluas peluang penduduk untuk mencapai hidup yang layak, yang dilakukan melalui peningkatan kapasitas dasar dan daya beli. Peningkatan kapasitas dasar adalah upaya meningkatkan produktivitas penduduk melalui peningkatan pengetahuan dan derajat kesehatan. PDRB merupakan nilai total seluruh output akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian daerah, baik yang dilakukan oleh

⁴³ Nur Feriyanto, *Op.Cit.*, hlm. 169

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 159

warga lokal maupun warga asing yang bermukim di negara bersangkutan. Tingkat pembangunan manusia yang relatif tinggi akan mempengaruhi kinerja pertumbuhan ekonomi melalui kapabilitas penduduk dan konsekuensinya adalah peningkatan produktivitas dan kreativitas masyarakat. Dengan meningkatnya produktivitas dan kreativitas tersebut, penduduk dapat menyerap dan mengelola sumber daya yang penting bagi pertumbuhan ekonomi.⁴⁵

Oleh karena itu pembangunan manusia yang ada tidak hanya diukur dengan pertumbuhan ekonomi saja. Dalam rangka melaksanakan pembangunan dipakai konsep pembangunan manusia yang mencakup dimensi pembangunan yang sangat luas dan bukan hanya menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi. Artinya pembangunan harus dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dan berkesinambungan, sehingga manusia ikut berperan aktif dalam mengisi pembangunan secara optimal.⁴⁶ Oleh karena itu sesuai dengan apa yang dikeluarkan oleh UNDP mengenai indeks komposit IPM disusun berdasarkan tiga indikator, yaitu angka harapan hidup, pendidikan, dan pendapatan yang sudah disesuaikan dengan paritas daya beli. Untuk mencapai pembangunan manusia suatu penduduk atau daerah harus memiliki peluang berumur panjang dan sehat, memiliki tingkat pendidikan yang memadai, serta peluang untuk merealisasikan pengetahuan yang dimiliki dalam kegiatan yang produktif sehingga memiliki pendapatan yang cukup dan memiliki daya beli serta kemauan untuk melakukan konsumsi bagi pemenuhan kebutuhannya.⁴⁷

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Nursiah Chalid dan Yusbar Yusuf, yang berjudul Pengaruh Tingkat Kemiskinan,

⁴⁵ Nadia Ayu Bhakti, Istiqomah, dan Suprpto, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia Periode 2008-2012", Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Soedirman, Volume 18, Nomor 4, 2014, hlm. 456

⁴⁶ Nur Feriyanto, *Op.Cit.*, hlm. 217

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 218

Tingkat Pengangguran, Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Laju Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau dengan hasil penelitian terdapat pengaruh pengangguran, dan Upah Minimum Regional terhadap Indeks Pembangunan Manusia.⁴⁸



⁴⁸ Nursiah Chalid dan Yusbar Yusuf, “Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Laju Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau”, Jurnal Ekonomi, Universitas Riau, Volume 22 Nomor 2, 2014, hlm. 11-12